



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI TRAINING DAN DISKUSI
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2015
Waktu : 09:00 s/d Selesai
Tempat : Hotel Morrissey, Jakarta
Agenda: : Training dan Diskusi tentang Gap antara Template Inception Report dari IA dengan Standar EITI

Notulensi

Training dan Diskusi tentang Gap antara Template Inception Report dari IA dengan Standar EITI dibuka oleh Bpk Andi Novianto selaku Koordinator Nasional EITI Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif. Menurut rapat Tim Pelaksana, akhir tahun ini akan diajukan revisi untuk Perpres ini. Tim kecil (PIC dari Tim Pelaksana) diharapkan memberikan rekomendasi untuk revisi Perpres ini sebelum dibahas di Rapat Tim Pelaksana. Indonesia telah mendapatkan status "compliant" pada oktober 2014, namun pada awal tahun 2015 status menjadi suspended karena keterlambatan Laporan ketiga. Dari 48 negara yang telah mengimplimentasikan EITI, terdapat 5 negara yang dalam status suspended, termasuk Indonesia. Laporan ketiga EITI Indonesia yaitu laporan tahun 2012-2013 diharapkan selesai pada bulan oktober 2015. Laporan ketiga tak hanya mencakup laporan rekonsiliasi, namun juga aspek kontekstual.

Presentasi dari *Natural Resources Governance Institute (NRGI)* dan Sekretariat EITI Internasional

Presentasi disampaikan oleh Bpk Emmanuel Bria dari NRGI dan Bpk Alek Gordy yang berada di Bangkok, Thailand melalui sambungan skype. Bpk Emmanuel Bria akan menyampaikan contoh-contoh template dari negara-negara lain yang telah mengimplementasikan EITI. Bpk Alex Gordy menyampaikan presentasi dengan diawali beberapa pertanyaan kepada Tim Pelaksana (List Pertanyaan dapat dilihat pada lampiran/bahan presentasi). Poin-poin dalam

kegiatan ini yaitu:

- Bpk Edi Effendi dari Sekretariat EITI melemparkan pertanyaan apa yang harus dilakukan apabila ada satu persyaratan EITI, namun hal tersebut tidak ada di Indonesia contohnya barter infrastruktur. Bpk Alex menjawab bahwa seluruh anggota Tim Pelaksana harus membahas dan dapat membuktikan bahwa hal tersebut memang tidak ada di Indonesia, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pelaporan. Ibu Selvi dari SKK Migas menambahkan di Indonesia tidak ada barter karena industri Migas adalah milik pemerintah yang akan dikembalikan perusahaan ke pemerintah melalui pajak, royalti dll.
- Bpk Alex menganjurkan ke Independent Administrator (IA) dalam laporan EITI terbaru sebaiknya dicantumkan juga cost recovery. Ibu Selvi menjawab pencantuman cost recovery akan dicantumkan secara umum, dan tidak dicantumkan tiap perusahaan. Bpk Emmanuel memberikan rekomendasi bahwa lebih baik cost recovery dilakukan per perusahaan. Laporan tentang cost recovery telah diputuskan oleh Tim Pelaksana bahwa cost recovery akan dilaporkan secara umum.
- Bpk Alex menanyakan perkembangan pelaporan dalam hal Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak IA menjawab bahwa CSR tidak diwajibkan dan hanya merupakan anjuran pada perusahaan Migas, sementara CSR diwajibkan dalam laporan perusahaan Minerba. Ibu Selvi menambahkan bahwa pelaporan CSR sebenarnya sukarela, karena belum ada aturan di perusahaan Migas, sementara dalam perusahaan Minerba telah ada aturan pemerintah. Namun Bpk Mukhlis dari Indonesia Mining Association (IMA) mengatakan walaupun telah ada aturan untuk perusahaan Minerba, CSR masih tetap merupakan sukarela.
- Bpk Nat Adams dari Bank Dunia mengatakan bahwa minggu sebelumnya telah ada rapat Tim Pelaksana sehingga sekretariat EITI segera menyampaikan hasil rapat tersebut. Bpk Ronald dari sekretariat EITI menyampaikan bahwa pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 12 Juni 2015 telah ada keputusan untuk laporan rekonsiliasi, sementara informasi kontekstual belum mencapai kata sepakat. Kemudian dibentuklah Tim Kecil dari Tim Pelaksana atau Tim Teknis yang kemudian mengadakan rapat lanjutan pada tanggal 17 Juni 2015. Pada rapat lanjutan Tim Pelaksana ini, telah mencapai kata sepakat untuk informasi kontekstual, sehingga dalam kegiatan diskusi ini, tidak bisa mengubah keputusan yang telah dibuat. Minutes of Meeting atau notulen Rapat Tim Pelaksana masih dalam proses penyelesaian. Bpk Nat menyarankan pertemuan kali ini lebih membahas perkembangan template pelaporan apakah bisa dibuat lebih baik lagi.

- Bpk Emmanuel Bria kemudian melanjutkan presentasinya terutama tentang template pelaporan, termasuk memberikan contoh template pelaporan dari negara-negara lain. (Lihat dalam lampiran)
- Bpk Edi menanyakan bagaimana cara rekonsiliasi CSR apabila hal ini tidak dilaporkan perusahaan ke pemerintah. Bpk Alex menjawab bahwa CSR tak perlu untuk dilakukan rekonsiliasi.
- Bpk Alex menanyakan apakah Tim Pelaksana telah memutuskan pelaporan yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Bpk Ronald menjawab tiga provinsi kaya energi yaitu Riau, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur akan memberikan pelaporan sebagai sample, karena tiga provinsi tersebut memiliki DBH yang besar apabila dibandingkan dengan DBH provinsi lain. DBH tidak harus direkonsiliasi, namun harus dapat dilaporkan berapa yang harus diterima pemerintah daerah dan berapa yang ada di Pemerintah pusat.
- Bpk Emmanuel menanyakan ke Bpk Alex apakah dalam ekspor akan ada rekonsiliasi antara pemerintah dan pembeli. Bpk Alex menjawab bahwa rekonsiliasi tidak disyaratkan, namun hal ini dianjurkan karena sangat sesuai dengan Indonesia, terutama untuk mengontrol adanya mafia.
- Bpk Emmanuel dari NRG1 merekomendasikan adanya rekonsiliasi DBH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bpk Alex mengatakan hal tersebut sangat bagus untuk Indonesia, namun tidak disyaratkan pada pelaporan EITI.
- Bpk Emmanuel menanyakan kenapa template untuk BUMN tidak tercantum di Inception Report dan Scoping Study. Ibu Dessy dari IA mengatakan akan mengundang BUMN dan meminta data dari BUMN. Bpk Alex mengatakan template untuk BUMN harus melaporkan dengan standar yang sama dengan perusahaan lainnya.
- Bpk Alex menawarkan bantuan apabila Tim Pelaksana membutuhkan panduan untuk pelaporan atau contoh-contoh dari negara lain yang telah menyelesaikan pelaporan EITI.
- Bpk Edi mengatakan kepada Bpk Alex bahwa EITI Indonesia telah melaksanakan sosialisasi template kepada Perusahaan Minerba, dan akan segera melaksanakan sosialisasi template Perusahaan Migas. Permintaan pengisian template secara informal telah diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan, namun pengiriman secara formal masih belum dilakukan karena menunggu proses administrasi agar sesuai prosedur. Independent Administrator (IA) menyampaikan perkembangan aktivitas penyelesaian Laporan EITI, bahwa telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana tentang proses

rekonsiliasi pada Rapat Tim Pelaksana pada tanggal 12 Juni 2015. IA telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang Inception Report dari berbagai pihak seperti Bpk Alex, NRGi, dan CSO. Informasi kontekstual telah disetujui pada rapat Tim Teknis dari PIC Tim Pelaksana pada tanggal 17 Juni 2015.

- Sekretariat EITI akan segera menyampaikan ke semua stakeholder Minutes of Meeting atau Notulen Rapat Tim Pelaksana tanggal 12 Juni 2015 dan Rapat Tim Teknis dari PIC Tim Pelaksana pada tanggal 17 Juni 2015. Bpk Mukhlis menambahkan bahwa Inception Report tak akan bisa memuaskan semua pihak, namun Tim Pelaksana telah mengambil keputusan. Laporan EITI harus segera diselesaikan dengan waktu yang sangat terbatas, apabila ada kekurangan dapat diperbaiki pada laporan berikutnya. Pendistribusian notulen Rapat Tim Pelaksana harus segera dilakukan agar semua pihak mengetahui persetujuan dari Tim Pelaksana.
- Bpk Edi dari Sekretariat EITI menyampaikan perkembangan proses pembuatan Laporan EITI akan dibahas pada Rapat Tim Pelaksana bulan Agustus. Pada Rapat Tim Pelaksana bulan September, IA akan membawa draft untuk laporan final. Bulan Oktober diharapkan laporan ketiga EITI Indonesia telah selesai.

Notulen Training dan Diskusi ini dilengkapi dengan lampiran dari presentasi narasumber